

Sekuritisasi Penyebaran Virus Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia

Indra Tamsyah¹, Riris Namira Hidayat²

¹²Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: indratamsyah@fisip.unsri.ac.id

Abstract: Covid-19 were discovered in Wuhan, China and turned into a pandemic illness that undermined individuals all over the planet. The spread of the infection has constrained the public authority in any nations to make new policies to safeguard their citizens. The presence of the Covid is a danger to each nation and this is a non-traditional issue. Non-traditional security problems can be turned into security problems through a securitization process. Covid is not a part of security issue however, it can transform into a security issue since it is remembered for the class of wellbeing security and it is significant in keeping up with public safety. In this case study, the creator utilizes descriptive method with optional information assortment procedures or writing study, and furthermore securitization hypothesis to inspect the most common way of evolving non-security issue into security issue through five markers, thus are securitizing actor, speech act, existential treat, referent object/audience and extraordinary measure.

Keywords: Security, Corona Virus, Securitization, World Health Organization

Abstrak: Covid-19 ditemukan di Wuhan, Cina dan menjadi penyakit pandemi yang mengancam masyarakat di seluruh dunia. Penyebaran virus telah memaksa pemerintah di negara manapun untuk membuat kebijakan baru untuk melindungi warganya. Kehadiran virus corona adalah ancaman bagi setiap negara dan ini adalah masalah keamanan non-tradisional. Masalah keamanan non tradisional dapat diubah menjadi masalah keamanan melalui suatu proses sekuritisasi. Covid-19 bukan bagian dari masalah keamanan tapi bisa berubah menjadi masalah keamanan karena termasuk dalam kategori health security dan penting dalam menjaga keamanan nasional. Dalam studi kasus ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau studi pustaka, serta teori sekuritisasi untuk mengkaji proses perubahan isu non-keamanan menjadi isu keamanan melalui lima indikator yaitu aktor sekuritisasi, tindak tutur, ancaman eksistensial, objek rujukan/audiens dan ukuran luar biasa.

Kata Kunci: Keamanan, Covid-19, Sekuritisasi, Organisasi Kesehatan Dunia

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman melalui arus globalisasi, fokus kajian keamanan tidak hanya dipahami sebagai isu militer saja, akan tetapi juga memunculkan isu baru non-militer

meskipun isu tersebut tidak mengancam negara secara langsung. Isu keamanan mengenai berbagai hal yang tidak dan mampu dilihat, yang dapat mengancam keamanan negara, atau dalam konteks tulisan ini

mengancam keamanan manusia. Dalam kerangka berpikir seperti demikian, isu keamanan merupakan isu yang terkonstruksi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa cara pandang seseorang terhadap isu keamanan telah berubah setelah perang dingin. Hal ini juga menunjukkan agenda politik internasional telah berkembang, kini pemerintah lebih banyak memperhatikan isu-isu non militer, seperti hal yang mengancam hidup manusia yang tidak lagi disebabkan oleh isu militer, akan tetapi disebabkan oleh adanya penyebaran penyakit menular.

Munculnya fenomena ini dapat menjadi bahasan dalam kajian keamanan dengan istilah sekuritisasi. Sekuritisasi dialami pertama kali dan diuraikan oleh Waever dalam (McDonald) "*securitization may be defined as a process in which an actor declares a particular issue, dynamic or actor to be an 'existential threat' to a particular referent object*" (McDonald, 2008). Suatu isu dapat disekuritisasikan jika ancaman yang masuk harus melewati suatu tahapan, dengan tujuan agar semua yang terlibat (negara dan masyarakat) menyepakati apa yang dimaksud dengan merespon ancaman. Dengan kata lain, suatu isu dapat disekuritisasi jika negara atau pemimpin yang berkuasa menyampaikan dan kemudian di dengar oleh aktor lain karena membahayakan. Oleh karena itu, diperlukan aktor sekuritisasi yang pertama kali untuk mengangkat isu tersebut agar nantinya proses sekuritisasi berjalan dengan semestinya. (Yani, 2017)

Sama halnya dengan keadaan dunia saat ini, ketika WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, yang artinya virus ini telah melintas batas negara Cina atau menyebar ke seluruh dunia, bahkan virus ini tidak mengenal siapa yang akan terkena karena siapapun yang terpapar maka sangat berpotensi positif Covid-19 (KPCPEN). Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Coronavirus* yang ditemukan pada akhir 2019. (Hastuti, 2020)

Awalnya banyak laporan mengenai

pasien yang sakit berawal dari pasar hewan dan makanan yang berada di Wuhan. Bahkan orang yang pertama kali jatuh sakit adalah para pedagang pasar, ternyata diketahui bahwa pasar tersebut memang bukan hanya menjual makanan atau hewan biasa, namun pasar tersebut menjual hewan liar seperti ular dan kelelawar dan diduga pertama kali penyebaran virus ini berasal dari hewan, kemudian menyebar ke manusia dan terakhir manusia ke manusia. Karena itu Cina menjadi negara pertama yang tercatat memiliki laporan virus Covid-19 di dunia. Gejala dari virus ini yang pertama kali di rasakan Cina adalah ketika pasien terkena adanya sejenis *pneumonia* yang penyebabnya tidak diketahui dan diikuti oleh gejala-gejala berikutnya seperti gangguan pernapasan, gangguan ginjal, demam, *anosmia*, flu, bahkan jika yang terinfeksi virus ini adalah orang yang lanjut usia dan ibu sedang hamil maka efeknya akan lebih berbahaya. (Hastuti, 2020)

Bermula dari Cina penyakit ini menular ke seluruh negara baik negara maju seperti Italia, Spanyol dan Denmark, bahkan ke negara berkembang seperti Indonesia, penyebaran virus ini sampai ke Indonesia dengan pengumuman resmi pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020 (Sukur, 2020). Bahkan Joko Widodo Presiden ke 7 Indonesia memberikan penegasan yang disampaikan melalui CNBC bahwa "sebanyak 213 negara yang berada di dunia ini tidak akan ada yang siap menghadapi pandemi Covid-19 (Asmara, 2020). Presiden Joko Widodo juga mengatakan masyarakat Indonesia secara terpaksa harus hidup berdampingan dengan Covid-19 bahkan Jokowi mengatakan melalui WHO virus *corona* tidak akan menghilang (detikcom, 2020). Tidak hanya Indonesia, hingga pada akhir November 2020 sebanyak 60,2 juta warga dunia yang positif Covid-19 yang terus bertambah. Yang berarti Covid-19

tidak mengenal warna kulit, ras, latar belakang, suku, agama ataupun usia, Covid-19 bisa menyerang siapapun dengan waktu yang sangat cepat.

Tidak bisa dihindari, dibutuhkan internasionalisasi perlawanan terhadap pandemi Covid-19. Terdapat dua faktor yang menandai kesehatan menjadi isu keamanan, yaitu pertama kali sejak tahun 1990 dimana terjadi agenda perluasan keamanan. Dengan berakhirnya Perang Dingin menjadi awal pergeseran fokus analisis keamanan dari ancaman militer menjadi lebih beragam untuk menjadi bahasan studi keamanan. (Yani, 2017)

Berkaitan dengan kesehatan yang tidak selalu diuraikan sebagai kondisi dimana tidak ada penyakit (*not just the absence of disease*) akan tetapi kebutuhan yang harus dijamin negara secara menyeluruh. Faktor kedua yang mendorong kesehatan menjadi isu keamanan yaitu *human agency*. Beberapa individu yang berpengaruh menggunakan posisi pengaruhnya demi memasukkan posisi dan pengaruhnya demi memasukkan kesehatan dalam agenda keamanan hingga keamanan internasional. Contoh Gro Harlem Brundtland selaku pimpinan WHO terdahulu, Brundtland menekankan bahwa terdapat perubahan sifat keamanan publik dunia dalam dunia global, serta kesehatan global tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial dan politik. Pada kenyataannya *global health security* pertama kali diciptakan oleh WHO pada masa jabatan Brundtland. Dengan kata lain, Brundtland adalah pencetus istilah *global health security* (Brundtland, 2017)

Dengan memasukkan isu kesehatan menjadi isu keamanan maka diharapkan kesehatan global bisa diatasi dengan kebijakan yang bisa di realisasikan. Penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana proses *global health security* menjadi isu keamanan global yang disebut dengan proses sekuritisasi. Ketika pandemi telah mendunia maka garda terdepan perlawanannya adalah negara, dan negara juga berperan sebagai aktor utama dalam memerangi ancaman hingga

ke ranah internasional. Dibutuhkan pengamanan atau sekuritisasi seperti yang dikatakan Jokowi sebagai “peperangan” dan respon pemerintah Indonesia terhadap Covid-19 dapat dikaji melalui teori sekuritisasi (Arifin, 2020). Disini penulis akan mengkaji lebih luas bagaimana proses sekuritisasi terhadap penyebaran virus *corona* tahun 2020 dan untuk menentukan apakah proses sekuritisasi itu berhasil.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sekuritisasi

Teori ini sangat bergantung pada kekuatan ide dan tindakan politis aktor untuk menyebarkan suatu isu menjadi wacana keamanan dengan adanya pihak-pihak yang terancam (Buzan, 1998:24-27). Kekuatan ide dan tindakan politis ini dapat dilihat melalui *speech act*, Pernyataan disampaikan untuk membentuk nilai dan pandangan baru bahwa isu atau fenomena yang awalnya dianggap biasa menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga menjadi agenda keamanan yang penting bagi nasional dan internasional (Austin, 2011: 3). Dikatakan bahwa apabila sebuah negara terancam keamanan nasionalnya, dan ancaman tersebut kemudian datang secara tiba-tiba, mempengaruhi dan menurunkan kualitas hidup warga negara yang tinggal di dalamnya. Ancaman tersebut juga bersifat mempengaruhi sebuah negara untuk menjaga kualitas hidup normal warga negaranya. Pengertian ancaman dalam sekuritisasi dikaitkan dengan sifat dari ancaman tersebut yang dapat membahayakan keselamatan individu (warga negara) seperti dari kekerasan fisik, terbatasnya akses terhadap kebutuhan pokok, adanya penyebaran penyakit menular, menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan adanya penurunan kualitas hidup di dalam negara.

Persepsi tentang keamanan dan ancaman menurut Copenhagen tidak

hanya sebatas keamanan kedaulatan negara dan ancaman yang datang dari pihak eksternal, tetapi keamanan nasional negara bisa terancam apabila muncul fenomena-fenomena seperti; wabah atau penyakit menular, isu seputar mayoritas-minoritas; adanya penguasaan sumberdaya oleh kelompok tertentu dan sebagainya. Dengan adanya bentuk-bentuk ancaman seperti diatas maka dapat mendorong sebuah negara untuk melakukan langkah pengamanan untuk melindungi keamanan nasional dan warga negaranya, dalam teori Copenhagen disebut dengan langkah Sekuritisasi (*Securitizing Move*).

Menurut pandangan Mazhab Kopenhagen, sekuritisasi di sini dipahami sebagai suatu tindakan untuk mengonstruksi suatu isu keamanan. Copenhagen School menghadirkan pembaharuan cara pandang terhadap studi keamanan pasca perang dingin. Aliran ini mengatakan perlu adanya *deepening* (pendalaman) dan *widening* (perluasan) dalam studi keamanan. Pendalaman yang dimaksud adalah dari level aktor yang terlibat tidak hanya terfokus kepada negara, akan tetapi level aktor bisa meluas dari sistem internasional hingga individu. Sedangkan perluasan adalah ancaman yang datang kepada aktor atau objek yang terlibat tidak hanya dari militer namun ancaman bisa datang dari bidang yang lain di dalam kehidupan baik itu kesehatan, ekonomi, teknologi dan lain-lain. Copenhagen School selanjutnya beranggapan bahwa lebih menarik untuk melihat proses terciptanya dinamika keamanan yang dapat membingkai suatu isu menjadi isu keamanan dalam kondisi tertentu (Farabi, 2019).

Buzan, Weaver dan Wilde kemudian menawarkan teori sekuritisasi yang melihat keamanan sebagai sebuah proses pembingkaiannya sebuah isu berawal dari aktor sekuritisasi melihat sebuah masalah yang dinilai dapat menjadi ancaman bagi stabilitas kehidupan, kemudian aktor sekuritisasi meyakinkan objek yang dilindungi dalam hal ini objek berubah

menjadi *audiens*. Setelah *audience* menerima sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor kemudian bersama menetapkan kebijakan atau aturan terkait isu yang disekuritisasikan, maka proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil (Hendra, 2018).

Seperti yang diuraikan oleh Weaver dan kemudian Buzan, asal usul sekuritisasi bertujuan untuk menjelaskan bahwa keamanan adalah proses sekuritisasi yang dibangun secara sosial melalui perilaku dikursif agen sosial. Dari perspektif keamanan ini kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan seperti; siapa yang pertama kali melakukan sekuritisasi? Kemudian untuk ditujukan pada siapa? Dalam kondisi yang bagaimana. Dan apa hasilnya? Ini merupakan hasil dari sekuritisasi. Weaver dan Buzan kemudian menguraikan dan mencoba menjelaskan karena suatu isu keamanan tidak mungkin bisa langsung terjadi dan keamanan adalah proses dari sekuritisasi yang dibangun secara sosial oleh agen sosial, bagi mereka dan upaya sekuritisasi adalah yang disebut tindak tutur dalam teori Bahasa (Barry Buzan, 1998).

Indikator serta proses bagaimana sekuritisasi berjalan menurut Buzan antara lain (1) terdapat aktor sekuritisasi atau seseorang yang melakukan sekuritisasi (2) *speech act*, yakni membingkai suatu isu non-politik menjadi isu yang dapat mengancam stabilitas keadaan (*existential threat*) sehingga terdapat *urgency* untuk melakukan perlindungan (3) *target audience* supaya menjadi terpengaruh bahwasanya isu yang diangkat benar-benar dalam keadaan terancam dan kemudian menjadi *referent object* di isu keamanan (4) kemudian *extraordinary measure* atau tindakan luar biasa yang dilaksanakan oleh aktor sekuritisasi dengan tujuan menyelamatkan *referent object* yang ada dalam isu keamanan yang diangkat (Sudiar, 2019). Terdapat tiga faktor utama yang mendukung keberhasilan

suatu proses sekuritisasi yakni (1) Bahasa yang digunakan tepat dalam usaha melakukan *speech act*, (2) *Power* atau kekuatan sosial yang dimiliki *securitizing actors*, (3) Kemampuan *securitizing actors* until menyampaikan serta menjalankan adanya suatu ancaman serius yang mengancam *referent object* kepada *target audience* (Susiatiningsih, 2016).

Proses sekuritisasi dimulai dengan adanya aktor sekuritisasi (*securitizing actors*) yang memiliki peran atau jabatan penting dalam pemerintahan, seperti pejabat negara, tokoh masyarakat, organisasi internasional dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan penyampaian atau pernyataan (*speech act*) berupa orasi atau siaran pers bahwa terdapat satu isu serius yang dapat menjadi ancaman (*existential threat*) bagi banyak pihak, yang disampaikan di hadapan publik (*target audience*) supaya ancaman atau *threat* tersebut dianggap publik sebagai peringatan (*alert*) yang dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara, sehingga kemudian akan dibuat suatu tindakan penyelesaian (*emergency response*) yang tanggap dan diluar dari kebijakan atau peraturan pada umumnya (Pratiwi, 2022).

Proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil berdasarkan kemampuan dari *securitizing actor* dalam membingkai atau mengkonstruksi isu yang ada sehingga terdapat argumentasi bahwa ada ancaman terhadap *referent object* serta dapat meyakinkan penonton atau *audience* bahwa isu yang diangkat tersebut harus diberi langkah dan tindakan penanganan secepat mungkin. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam keberhasilan dalam melakukan sekuritisasi adalah persetujuan atau dukungan dari *target audience* atas tindakan mendesak (*extraordinary measures*) yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam usahannya melindungi *referent object* dari ancaman (*existential threat*). Selanjutnya yang dimaksud dengan *acceptance by audience* adalah proses di mana *securitizing move* yang dilakukan oleh *securitizing actors* yang

mengangkat sebuah isu menjadi ancaman (*existential threat*) berhasil diterima atau dipercaya oleh publik yang ditargetkan dalam proses sekuritisasi (Farabi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, untuk memaparkan proses secara detail. Kemudian, metode pengumpulan data memakai studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan dengan isu yang bersangkutan, selanjutnya memunculkan sebuah pertanyaan, mengumpulkan data hingga menganalisisnya secara menyeluruh (Creswell, 1994:38). Setelah itu, jawaban penulis dalam penelitian ini dikondisikan dengan teori yang sesuai dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional yaitu teori Sekuritisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Securitizing Actor and Speech Act

Aktor sekuritisasi merupakan aktor yang melakukan sekuritisasi dengan mengutarakan *referent object* sebagai ancaman. Lazimnya aktor sekuritisasi memiliki kedaulatan dan kekuatan untuk mengambil keputusan dan meyakinkan audiens akan ancaman yang akan datang. Sebagai contoh elit politik, pemerintah, organisasi dan masyarakat sipil. *Securitizing actor* harus dalam pemegang kendali atau memiliki otoritas penuh dalam mengaplikasikan kebijakan sekuritisasinya baik kepada perorangan maupun kepada lembaga-lembaga terkait. Kondisi kedua, *securitizing actor* harus memiliki kekuatan politik untuk mendorong (dan sedikit memaksa) agar ancaman ataupun kerentanan yang dipersepsikan harus sama dengan pihak lain terutama masyarakat. Secara keseluruhan proses sekuritisasi berhasil bergantung sepenuhnya pada usaha *securitizing actor* melakukan persuasi dan pencitraan kepada audiens

mengenai kebijakan tersebut, karena atas kewenangan tersebut seharusnya bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dibuat. (Yani, 2017)

Untuk merubah suatu isu keamanan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi ancaman yang ada, teori ancaman dalam sekuritisasi dikonstruksikan melalui proses *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actor* kemudian *securitizing actor* melakukan orasi dengan cara *campaign* atau menyebarluaskan eksistensial dan melakukan pembuatan kebijakan. *Speech act* menurut Asutin (1965:94) “*by saying something, we do something*”. *Speech act* merupakan variabel yang sangat penting untuk meyakinkan audiens bahwa akan ada ancaman dari objek yang dilindungi dan menjadi landasan keberhasilan atau gagalnya oleh *securitizing actor*. (Yani, 2017)

Intinya di dalam *speech act* ini, bahwa penggunaan bahasa tidak hanya sebagai pemberi laporan terhadap objek atau realita, tetapi juga berperan untuk membentuk realitas dan makna saat bahasa tersebut diucapkan. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki peran penting sebagai alat dan media untuk membentuk realita. Dalam kajian studi bidang hubungan internasional, bahasa juga digunakan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional sebagai alat atau media dalam menciptakan realita sosial.

Pemikir Mazhab Copenhagen School berpendapat bahwa *speech act* merupakan suatu tahapan sekuritisasi yang dilakukan oleh actor dalam situasi darurat seperti adanya ancaman dan permasalahan seperti aktor-aktor yang berpengaruh dan memiliki otoritas penuh pendeklarasian dilakukan oleh Direktur Jenderal WHO, Ketua dan Direktur Pelaksana IMF, Direktur Jenderal WTO yang mampu mendeklarasikan ancaman covid-19 merupakan ancaman global. Berikut ialah *speech act* yang dilakukan dalam proses sekuritisasi

Tabel 1. Speech Act

Tanggal	Pejabat pemerintah	Pernyataan
12 Maret 2020	Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus	“WHO terus memantau sejak ditemukannya kasus pertama, dan kami terus meminta kepada sejumlah negara untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif” (Dzulfaroh, 2020)
26 Maret 2020	Ketua dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva	“Dampak kemanusiaan akibat wabah Covid-19 tidak bisa dihitung lagi, semua negara perlu bekerjasama untuk melindungi masyarakat dan meminimalisasi dampak ekonomi yang terjadi” (Widyastuti, 2020)
26 Maret 2020	Direktur Jenderal WTO Roberto Azevêdo	“Covid-19, this new Covid-19, threatens the lives of millions of people around the world, it also endangers their livelihoods, we’re of course facing, above all, a health crisis. This pandemic will inevitably have an enormous impact on the economy on trade, and consequently on jobs and people’s well-being. This pandemic is a global challenge, so we need a global response, trade has an important role here. Trade is what allows for the efficient production and supply of basic good and service medical supplies and equipment, food and energy that we all need” (worldtradeorganization, 2020)

Seperti yang kita lihat dari tabel diatas, ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemic maka WHO merupakan pemegang mandat utama dalam urusan kesehatan skala global,

kemudian pernyataan dari ketua IMF dan Jenderal WTO juga menyatakan jika pandemic ini mengancam banyak pihak dan akan berdampak besar pada ekonomi dan perdagangan. Sebelum membahas lebih jauh disini terdapat aktor sekuritisasi yang kemudian *speech act* yang terjadi membingkai suatu isu non-politik menjadi isu yang dapat mengancam stabilitas keadaan (*existential threat*) sehingga terdapat *urgency* untuk melakukan perlindungan.

Speech act yang terjadi oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus "WHO terus memantau sejak ditemukannya kasus pertama, dan kami terus meminta kepada sejumlah negara untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif" (Dzulfaroh, 2020) pernyataan tersebut setelah pendeklarasian pandemi oleh WHO. WHO melalui *speech act* secara resmi menganjurkan seluruh masyarakat dunia menerapkan *physical distancing* yang artinya menjaga jarak fisik, *social distancing* yang artinya menjaga jarak sosial agar masyarakat tetap terhubung melalui media sosial, di mana menurut WHO langkah menjaga jarak baik fisik maupun menjaga jarak sosial untuk menekan penyebaran Covid-19.

Securitizing actor pertama kali menurut penulis adalah bagaimana WHO selaku organisasi kesehatan dunia mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global dan bagaimana respon terhadap aktor yang bisa berpengaruh di dalam suatu negara tersebut bisa diterima oleh *audience*. *Securitizing actor* yang dilakukan oleh Direktur Jenderal WHO membuat negara-negara sigap dalam mengeluarkan kebijakan baru terkait penyebaran wabah ini. Pemimpin bisa dijadikan *securitizing actor* di negara tersebut yang kemudian melakukan kebijakan. Dimulai dari Cina, respon pemerintah China dengan tanggap dibuktikan ketika Presiden Xi Jinping selaku *securitizing actor* mendeklarasikan pandemi Covid-19 sebagai ancaman nasional dan ancaman global. Presiden Xi Jinping mulai merespon kasus Covid-19

pada Januari 2020. Kasus Covid-19 telah dilaporkan di berbagai negara bahkan di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam (Sari, analisis Respons Pemerintah Tiongkok dalam Upaya Penanganan Covid-19, 2020).

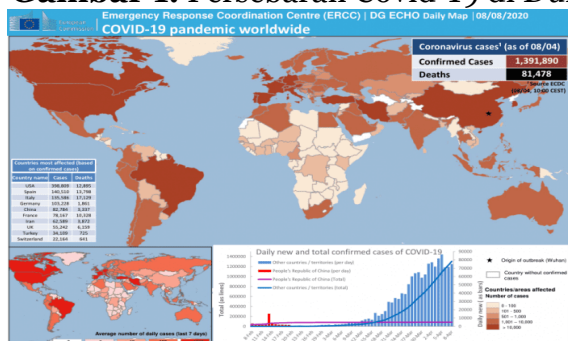
Presiden Xi Jinping kemudian memberikan *speech act* dengan menghimbau pentingnya keselamatan dan kesehatan seluruh rakyat melalui surat kabar Partai Komunis Tiongkok, melalui *speech act* virus dirangkul menjadi *health security*, semua negara berupaya dalam melindungi keselamatan warganya. Sebagai negara yang mendatangkan pertama kali Covid-19 jenis baru yang ditemukan pada akhir Desember 2019 awalnya dianggap tidak tanggap dalam menanggulangi permasalahan ini. Bahu-membahu negara-negara yang dibantu oleh organisasi internasional, contohnya saja IMF yang siap menggelontorkan semua kapasitas pinjaman sebesar Rp16.410 triliun untuk melindungi negara dari virus Covid-19, karena pembatasan mobilitas yang akan dilakukan oleh negara sudah diperkirakan perekonomian juga ikut anjlok. Georgieva selaku Direktur Pelaksana IMF mengatakan ini adalah suatu bentuk solidaritas seluruh negara, karena dampak keamanan manusia dalam wabah ini sudah tidak bisa dibendung sehingga membutuhkan kerjasama agar bisa menekan angka virus Covid-19 (Widyastuti, 2020).

Existensial Threat (Ancaman)

Dalam proses sekuritisasi teori selanjutnya adalah *existensial threat* atau ancaman. *Existensial threat* dapat dikatakan sebagai ancaman yang muncul pada objek keamanan, seorang ahli William juga memberikan pendapatnya mengenai definisi ancaman dalam sekuritisasi yaitu adanya kerentanan dengan tingkat yang tinggi. Dalam proses sekuritisasi ini yang menjadi ancaman adalah

pandemi virus Covid-19 yang menyebar ke negara-negara di dunia. Awal mula ditemukannya virus ini adalah pada akhir desember 2019 di mana para dokter di Wuhan, China, menyadari adanya penyakit baru dengan gejala yang belum ditemukan sebelumnya.

Gambar 1. Persebaran Covid-19 di Dunia



Sumber: (reliefweb, 2020)

Dokter di Wuhan juga melaporkan temuan virus varian baru ini ke WHO agar WHO bisa meneliti lebih lanjut hingga pada akhirnya penyakit tersebut diketahui sebagai Covid-19 jenis baru dan kemudian diresmikan sebagai pandemi pada Maret 2020. Covid-19 disebut pandemi karena penyakit ini telah menyebar ke negara-negara lain di dunia yang pada awalnya hanya berasal dari Cina hingga ke banyak populasi di berbagai negara. Virus Covid-19 terus menyebar selama awal tahun 2020 ke negara negara besar maupun kecil. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan perkembangan penyebaran Covid-19 di negara yang berbeda pada tabel berikut:

Tabel 2. Tabel Kasus Covid-29 di Dunia

No	Nama Negara	Total Terjangkit	Total Sembuh	Total Meninggal
1.	Cina	81.637	73.770	3.285
2.	Italia	69.176	8.326	6.820
3.	Spanyol	42.058	3.794	2.991
4.	Jerman	32.991	3.290	164
5.	Iran	24.811	8.913	1.934
6.	Prancis	22.635	3.281	1.102
7.	Swiss	9.891	131	133
8.	Korea Selatan	9.137	3.730	126
9.	United Kingdo	8.164	140	423

	m			
10.	Indonesia	790	58	31
11.	Global	425.493	109.191	18.963

Sumber: John Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center (<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>) per 25 Maret 2020, pukul 16.39 WIB

Pada tabel perbandingan kasus Covid-19 di berbagai negara tersebut terlihat bahwa yang menempati posisi kasus terbanyak adalah Cina, Italia menjadi negara kedua dengan kasus Covid-19 terbanyak dan pada urutan ketiga adalah Spanyol. Cina pada saat itu menunjukkan perkembangannya dengan total pasien yang sembuh sebanyak 73.770 orang. *Speech act* selanjutnya pemerintah Cina merespon dengan strategi, strategi ini yang kemudian Cina mengeluarkan 3 kebijakan sebagai tahap penanggulangan virus sebagai strategi *containment*, kebijakan ini dikeluarkan untuk memberi ketegasan masyarakat bahwa Covid-19 adalah *existential threat* yang nyata, dan diharapkan untuk seluruh warga juga mendukung dan menerima atas kebijakan yang dilakukan oleh negara.

Sedangkan kasus di Italia semakin meningkat karena beberapa faktor, salah satu penyebabnya adalah karena mayoritas penduduk Italia yang berusia lanjut sehingga rentan terkena penyakit ditambah imunitas yang lemah membuat Italia kesulitan untuk mengurangi angka penyebaran virus. Dengan melihat tabel penyebaran itulah akhirnya Covid19 menjadi sebuah ancaman bagi keamanan negara di mana pandemi yang terus memakan korban ini akan mengancam stabilitas keamanan di negara tersebut khususnya dibidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu bagian dari teori keamanan negara yang juga harus dijamin oleh negara tersebut.

Referent Object & Audience

Referent object dalam pandangan Copenhagen dapat diartikan sebagai suatu objek yang sedang menghadapi ancaman serius dan berhubungan dengan keamanan individu maupun nasional, sesuatu yang dipandang secara nyata terancam dan mempunyai tuntutan resmi untuk bertahan. *Referent object* dapat dikatakan sebagai pihak yang terkena dampak dari ancaman dan merasakan ancaman tersebut terhadap keberlangsungan hidupnya. Pada pembahasan pandemi Covid-19 ini maka dapat dinyatakan *referent object* adalah masyarakat dari beberapa negara yang menjadi korban dari pandemi Covid-19 khususnya negara-negara yang mengikuti langkah atau anjuran oleh WHO kemudian pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai bagaimana cara menghadapi kasus tersebut di negara nya masing-masing untuk diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Di sini WHO sebagai alarm untuk semua negara di dunia untuk bersiap dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani wabah ini. Selain itu *referent object* hanya berperan dalam melakukan keputusan atau *speech act* yang telah disampaikan oleh aktor sekuritisasi.

Alasan mengapa negara-negara tersebut menjadi *referent object* pada proses sekuritisasi ini adalah karena semua *speech act* atau kebijakan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi atau pemerintah menuju kepada keamanan masyarakat dinegara tersebut, tidak hanya masyarakat tetapi pemerintah juga mementingkan keamanan negaranya baik dari bidang ekonomi hingga kesehatan. Salah satunya adalah dengan memberikan kebijakan terbaik bagi masyarakat di masing-masing negara tentunya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memfasilitasi mereka selama mematuhi dan menjalankan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Negara tersebut menjadi audiens dari proses sekuritisasi yang mengikuti *speech act* berupa kebijakan dari pemerintah yaitu dengan menerapkan sistem *lockdown* dan

mematuhinya.

Audiens dalam proses sekuritisasi Covid-19 adalah semua *stakeholder* yang mengikuti strategi *lockdown* dalam menghadapi pandemi; baik itu negara, organisasi internasional maupun individu-individu yang memiliki peranan tertentu. Audiens dalam proses sekuritisasi sangat penting, karena salah satu indikator keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor ialah pengakuan atau persetujuan, bahwa memang Covid-19 merupakan ancaman baru bagi kesehatan yang perlu dilakukan langkah pencegahan atau aturan sebagai *counter* untuk menghadapinya. Dari audiens inilah akan terlihat bahwa *speech act* memengaruhi keamanan dan proses sekuritisasi Covid-19. Pada pembahasan pandemi Covid-19 ini maka dapat dinyatakan *referent object* adalah beberapa negara yang menjadi korban dari pandemi Covid-19 khususnya negara-negara yang mengikuti langkah atau anjuran pemerintah mengenai bagaimana cara menghadapi kasus tersebut.

Negara-negara membuat kebijakan dalam pembatasan mobilitas yang sangat ketat yang kemudian berimbas pada pelumpuhan perekonomian negara dan banyak negara yang akhirnya mengalami resesi. Akan tetapi tidak banyak pilihan selain memperketat pembatasan mobilitas agar pertumbuhan Covid-19 dapat ditekan.

Extraordinary Measure

Extraordinary Measure atau tindakan luar biasa disini adalah suatu tindakan untuk meminimalisir ancaman yang akan datang, Tindakan luar biasa yang dilakukan beberapa negara menerapkan sistem *lockdown* untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di negaranya. Negara-negara yang menerapkan sistem *lockdown* tersebut adalah Cina, Italia, Denmark dan beberapa negara lainnya. China merupakan negara pertama yang

melakukan sistem *lockdown*. Selain *lockdown*, Cina memiliki 3 strategi lainnya dalam memerangi Covid-19, yaitu:

Tabel 3. Strategi Cina Melawan Covid-19

Negara	Tindakan
China	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cina melakukan isolasi mandiri yang berfokus pada pencegahan virus ini keluar dari Wuhan, menutup pasar dan pada Januari 2020 Cina menegaskan untuk menerapkan <i>lockdown</i> di Wuhan, pada saat itu Wuhan berpenduduk 11 juta orang dan menurut sejarah bahkan penguncian terbesar kemudian Cina mengunci Hubei dengan total penduduk 45 juta orang yang akan ter-<i>lockdown</i> pada 3 bulan kedepan yang artinya penghuni harus tinggal di dalam rumah. 2. Cina melakukan mobilisasi massa. Pada 23 Januari 2020 Cina memperketat lalu lintas, lalu mengalirkan semua sumber daya untuk puluhan staf medis, peralatan medis, relawan penanganan Covid-19 dan militer untuk ditempatkan di Hubei dan Wuhan untuk mendukung “perang virus rakyat.” Akan tetapi disini China bisa dikatakan solid dan berhasil, siapa sangka dengan adanya pandemi seperti ini banyak sekali relawan Cina yang datang untuk menjadi relawan di dalam Cina sendiri maupun dari seluruh negeri. Terdapat 42.000 tenaga medis yang berdatangan untuk

	<p>membantu Hubei dan Wuhan. Bahkan keagresifan Cina juga membawa hal positif dengan membangun 2 rumah sakit dalam jangka 10 hari dengan 12.000 pekerja. Rumah sakit ini diberi nama Leishenshan dan Huoshenshan untuk merawat ribuan pasien yang terjangkit Covid-19</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kemudian yang ketiga, adalah teknologi di Cina yang canggih. Pemerintah Cina mengaplikasikan teknologinya dengan kecerdasan buatan atau <i>artificial intelligence</i> (AI) atau penggunaan data besar. Yang berfungsi untuk menelusuri kontak dengan pengelolaan populasi prioritas dan adanya penelitian ilmiah mengenai vaksin, terapi, dan pengetahuan tentang pencegahan. Di era globalisasi maka penggunaan teknologi sangat membantu dalam memerangi Covid-19, kecanggihan teknologi ini bisa memberikan suatu informasi, memantau aktivitas dan lain sebagainya.
--	---

(Sari, Analisis Respons Pemerintah Tiongkok dalam Upaya Penanganan Covid-19, 2020)

Ketiga tahap upaya dan strategi dari Cina adalah bentuk dari tindakan luar biasa (*extraordinary measure*) karena kita bisa melihat bahwa negara Cina sendiri sangat agresif dan *responsive*. Selain dengan bantuan pemerintah, pada saat Covid-19 melanda maka kerja sama pihak

masyarakat dan pemerintah sangatlah penting. Karena negara sebagai posisi pembuat kebijakan sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas, ketika pandemi Covid-19 bukan hanya Cina, seluruh negara bersatu ke pertempuran dengan satu hal yang dituju yaitu mengalahkan Covid-19. Keberhasilan Cina dalam memerangi Covid-19 dapat dilihat dari bentuk grafik penyebaran yang semakin menurun, keberhasilan tersebut adalah yang seharusnya menjadi contoh dan pelajaran kepada negara lain untuk bagaimana mereka juga harus bisa berkaca pada Cina. Disini Cina merupakan negara pertama yang melakukan sistem *lockdown* pada tanggal 25 Januari 2020. Setelah Cina ada Italia yang ikut melakukan *lockdown*, hingga kemudian diikuti beberapa negara lainnya. (Aviariska, 2020).

Negara kedua yang melakukan kebijakan *lockdown* nasional adalah Italia sekaligus negara pertama di Eropa, di mana pemerintah Italia mengkonfirmasi kasus pertama pada 30 Januari 2020 dan memberlakukan *lockdown* nasional pada 9 Maret 2020. Akan tetapi dalam penanganan virus ini Italia dinilai lamban dan tidak siap karena pemerintahan gagal mendeteksi virus yang tersebar bahkan pada 06 Maret 2020 Italia menjadi negara yang menangani kasus Covid-19 sangat buruk di dunia. Ketika virus sudah tersebar dengan cepat barulah Italia berkaca pada China untuk melakukan *lockdown*. Alasan Italia lamban menghadapi kasus ini adalah tidak memiliki pengalaman mengenai krisis ini dan bingung bagaimana meresponnya. Tentu saja berbeda dengan Cina yang memang sudah berpengalaman dari virus sebelumnya yang pernah terjadi seperti kasus flu burung dan lainnya. Akan tetapi sewaktu pemberlakuan *lockdown*, Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, melalui *speech act* mengatakan bahwa “masa depan Italia ada di tangan kita, dan tangan tangan kita harus lebih bertanggung jawab dari sebelumnya, untuk alasan itulah hari ini tindakan-tindakan ini diberlakukan di seluruh

wilayah semenanjung” yang artinya semua masyarakat dan pemerintahan memerlukan adanya kerjasama dalam kebijakan *lockdown* ini agar angka penyebaran korban positif Covid-19 tidak terus melambung naik karena hingga 24 Maret 2020 sudah sekitar 69.176 kasus. (Aviariska, 2020).

Kemudian pembatasan ini juga termasuk larangan perjalanan, larangan acara publik, penutupan bisnis dan penangguhan di sekolah serta universitas. Fase pertama *lockdown* di Italia pada 13 April 2020 dan diperpanjang oleh pemerintah Italia. Kemudian pada 4 Mei 2020 pemerintah Italia membuka *lockdown* secara bertahap dengan menyiapkan regulasi bagi masyarakat. Masyarakat Italia kemudian secara bertahap diperbolehkan berpergian yang hanya berada di wilayah dengan tetap mengikuti aturan untuk tidak berkumpul dengan banyak orang. Akhirnya pemerintah Italia melonggarkan *lockdown* karena Italia juga memprioritaskan perekonomian untuk bisa pulih. Kasus kematian akibat Covid-19 pada 3 Mei 2020 akhirnya menjadi kasus kematian yang kecil. (Aviariska, 2020).

Selanjutnya adalah Denmark, kasus pertama diumumkan pada tanggal 27 Februari 2020, Denmark merupakan negara kedua di Eropa yang menerapkan *lockdown* mulai 13 Maret 2020, penetapan status tersebut melalui *speech act* yang disampaikan oleh Perdana Menteri Frederiksen bahwa “pemerintah akan menutup taman kanak-kanak, sekolah dan universitas untuk 2 pekan kedepan sebagai upaya memperlambat penyebaran virus serta *lockdown* akan memberikan konsekuensi yang sangat besar”. Setelah terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 yang konsisten di Denmark, maka pada akhir Maret 2020 jumlah kasus sudah perlahan menurun dan dilakukannya pelanggaran *lockdown*. Yang sebelumnya Denmark melakukan penutupan sekolah dan menutup pintu

masuk bagi wisatawan asing, kini pada fase pertama pelonggaran pemerintah Denmark kembali membuka sekolah, membuka penitipan anak dan memperbolehkan masyarakat beraktivitas. (Aviariska, 2020).

Negara ketiga dengan kasus terbanyak setelah Cina, Italia adalah Spanyol, kebijakan *lockdown* di negara ini berlaku mulai 14 Maret 2020. Pemerintah mengharuskan agar warganya tinggal di rumah dan berpegangan saat keadaan darurat. Pemerintah Spanyol juga mengerahkan kekuatan sektor keamanan dan militer untuk menghentikan keramaian di tempat umum, bahkan pemerintah Spanyol juga mengerahkan keamanan dan militer untuk menghentikan pertemuan di tempat-tempat umum. Angkatan bersenjata juga diminta untuk menyediakan tempat berlindung bagi tunawisma, kemudian setelah melakukan *lockdown* dan kasus menurun, masyarakat Spanyol diizinkan untuk kembali bekerja. (Aviariska, 2020).

Dan terakhir yaitu Filipina yang menjadi negara di Kawasan Asia Tenggara yang paling ketat menerapkan *lockdown*, Duterte sebagai Presiden Filipina sangat tegas dalam penanganan Covid-19. Melalui *speech act*nya, Duterte mengatakan “saya perintahkan kepada polisi yang bertugas jika ada suatu peristiwa saat kalian bertarung, tembak mati saja mereka”. Presiden Filipina mengancam menembak mati orang yang melanggar aturan *lockdown*, Filipina memang tidak sebanyak negara lain seperti Cina, Italia, Spanyol, namun PBB mengatakan keprihatinannya terhadap pengamanan di Filipina lebih dari 30.000 orang di tangkap polisi. Pemerintah Filipina menutup semua penerbangan domestik dan perjalanan laut. Presiden Filipina Duterte juga telah memutuskan untuk memperpanjang *lockdown* di Manila hingga 15 Mei 2020. (Aviariska, 2020).

Lockdown disini dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat di mana fungsinya adalah untuk melakukan pembatasan orang-orang yang ingin

datang atau pergi ke daerah lain sehingga membuka kesempatan bagi penyebaran virus. Jadi dapat dikatakan bahwa *lockdown* ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang juga harus dilengkapi dengan jaminan kebutuhan sehari-hari misalnya kebutuhan pangan ataupun yang lainnya. Kemudian Presiden Filipina juga memutuskan untuk melakukan penguncian di Manila hingga 15 Mei 2020 sebagai tanggapan konfirmasi transisi domestik pertama.

Diskusi dan Analisis

Setelah tindakan luar biasa dilakukan, guna meminimalisir ancaman yang akan datang yakni pemberlakuan *lockdown* untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di dalam negeri, maka dampak dari pemberlakuan *lockdown* mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, keamanan kesehatan juga menjadi penting karena mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Aktor membuat kebijakan dalam pembatasan mobilitas yang sangat ketat yang kemudian berimbas pada perekonomian negara dan banyak negara yang akhirnya mengalami resesi. Akan tetapi tidak banyak pilihan selain memperketat pembatasan mobilitas agar pertumbuhan Covid-19 dapat ditekan. Pandemi Covid-19 memaksa semua orang menghentikan semua aktivitas pekerjaan, karena itu pemberlakuan *lockdown* saja tidak cukup untuk menanggulangi pandemic Covid-19, setelah keberhasilan *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi mempengaruhi seluruh negara untuk melakukan kerja sama baik itu bilateral regional hingga multilateral sebagai respon Pandemic Covid-19.

Dari pusat wabah dari virus Covid-19 secara perlahan Cina memulihkan citra nya. Cina mengirimkan tim ahli medis ke negara-negara lain, pinjaman uang dengan

bunga rendah dan pengiriman jutaan masker ke beberapa negara dan memberikan US\$ 20 juta untuk Organisasi Kesehatan Dunia. Negara yang kerap dikatakan “Negeri Tirai Bambu” tersebut mengirimkan sumbangan berupa masker bedah dan alat test ke Pakistan dan Filipina, kemudian Cina mengirimkan tim medis ke Irak, Iran dan memperpanjang masa pinjaman Sri Lanka untuk menekan penyebaran Covid-19 sebanyak 8 triliun. Presiden Xi Jinping juga menjanjikan Spanyol dan Italia bantuan dikarenakan kedua negara di Eropa tersebut memiliki tingkat dampak keparahan yang cukup tinggi akibat pandemic Covid-19, sekitar 26 ton persediaan bantuan ke Italia dengan 20 ahli medis kemudian Cina memberikan Spanyol 500.000 masker, negara Eropa lainnya yang di bantu oleh China adalah Serbia dan telah mengirimkan 1 juta masker ke Prancis, Yunani dan negara Uni Eropa lainnya. (Walsh, 2020).

Kemudian Xinhua mengabarkan akan mengirim bantuan lebih banyak termasuk dokter dan datang dalam beberapa hari mendatang ke Sri Lanka. Tidak hanya pemerintahan, orang terkaya di Cina yakni Jack Ma menyumbang sekitar 2 juta masker untuk di distribusikan ke seluruh bagian Eropa. Strategi China cukup memikat hati negara-negara di Eropa bagaimana tidak, Cina yang dikenal sebagai pusat wabah virus Covid-19 menjadi negara yang memberi bantuan ke dunia. (Iswara, 2020). Dengan melihat keberhasilan dari proses sekuritisasi berdasarkan keyakinan *referent object* terhadap adanya ancaman maka kerja sama antar negara perlu dilakukan. Juru bicara Kementerian luar negeri Cina mengatakan akan memperkuat kerja sama bersama dengan negara lain untuk menghadapi tantangan Covid-19 dengan membangun komunitas yang akan menjadi bagian masa depan umat manusia. Bahkan pada Maret 2020 menurut Kemenlu Cina akan memberikan bantuan ke 82 negara, WHO dan Uni Afrika. (Walsh, 2020).

KESIMPULAN

Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa Pejabat kesehatan di negara itu mengklaim bahwa langkah ini berhasil, Ada tiga tahapan dalam proses *speech act* suatu negara untuk mengubah isu menjadi isu keamanan. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi ancaman yang akan di persentasikan yakni pandemic Covid-19. Kemudian *securitizing actor* dalam posisi pemegang kendali dalam pengaplikasian kebijakan sekuritisasinya, dan *securitizing actor* harus memiliki kekuatan politik untuk mendorong bahkan memaksa. Selanjutnya *securitizing actor* dilakukan oleh organisasi internasional melalui *speech act*, yakni WHO yang pertama kali mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemic.

Kemudian Cina, dengan Presiden Xi Jinping selaku *securitizing actor* mendeklarasikan pandemic Covid-19 sebagai ancaman global. Yang kemudian melakukan *Extraordinary Measure* atau tindakan luar biasa untuk meminimalisir ancaman dengan melakukan *lockdown* yang berhasil.

Bahkan pemerintah Cina mendapatkan ucapan selamat oleh Direktur Jendral WHO atas tindakan yang luar biasa, meskipun di sisi lain harus menanggung kerugian baik di sektor ekonomi maupun sosial yang parah. Keberhasilan Cina tersebut akhirnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Italia, Denmark, Spanyol, Perancis dan Filipina. Setelah melakukan pelaksanaan *lockdown*, Cina dan negara lainnya mendapatkan hasil yang baik, di mana ada kemajuan dari tingkat penurunan korban dari Covid-19. Cina yang melakukan *lockdown* pada akhir Januari 2020 terbukti berpengaruh dalam peningkatan jumlah pasien sembuh, hal ini senada juga yang disampaikan oleh WHO bahwa Cina berhasil menerapkan *lockdown* di negaranya. Kemudian Italia juga mulai menerapkan sistem *lockdown* pada 9

Maret 2020. Pada saat itu tingkat kematian di Italia meningkat sehingga pemerintah perlu segera mengambil keputusan, semua aktivitas di luar rumah yang dibatasi.

Dari penerapan *lockdown* tersebut Italia berhasil mengurangi angka kematian dinegaranya. Selain itu ada Denmark yang menjadi negara pertama di Eropa yang menerapkan sistem *lockdown*. *Lockdown* berlangsung selama bulan maret dan mendapatkan penurunan dari jumlah kasus pada akhir maret. Spanyol menjadi negara keempat yang melakukan *lockdown* pada tanggal 12 April 2020. Pada saat itu kasus di Spanyol mulai menurun, hal ini juga diikuti oleh pemerintah yang melakukan strategi militer untuk melindungi masyarakatnya terutama bagi tunawisma. Setelah diberlakukannya *lockdown* di Spanyol, sebanyak 90 pasien pulang dari rumah sakit.

Dari bukti-bukti adanya penurunan kasus Covid-19 di negara tersebut maka negara-negara yang menerapkan sistem *lockdown* menjadi audiens dari *speech act* yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi dan telah membuktikan pengaruh dari *speech act* terhadap keberhasilan negara tersebut dalam mengurangi kasus virus Covid-19. Dan dapat disimpulkan proses sekuritisasi dikatakan berhasil. Dan berhasil atau tidak kebijakan di suatu negara dalam penanganan Covid-19 tergantung pada kesadaran masyarakat terhadap ancaman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, C. G. (2020, april 30). *Jokowi Sebut Tak Ada Satupun Negara yang Siap Hadapi Covid-19*. Diambil kembali dari cnbc: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430133235-4-155529/jokowi-sebut-tak-ada-satupun-negara-yang-siap-hadapi-covid-19>
- Arifin,R. (2020). Proses Sekuritisasi Pandemi Sars-Cov-2 (Covid-19) di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Hubungan Luar Negeri

Indonesia. *volume 4 number 1*, 15-32.

- Austin, John.L. 2011. *How To Do Things With Words; In Is The Environment A Security Threat? Environmental Security Beyond Securitization*. International Affair Review Vol. XX No.1.
- Aviariska, A. M. (2020). Kebijakan Karantina Wilayah Terkait Penanganan Pandemi COVID-19 di Berbagai Negara. *Vol. 9 No.2*, 67-73.
- Brundtland, G. H. (2017). Beberapa sekuritisasi keamanan. Dalam Y. M. Yani, *Pengantar Studi Keamanan* (hal. 63). Malang: Intrans Publishing.
- Barry Buzan, O. w. (1998). *security a new framework for analysis*. Amerika: Lynne Rienner publishers, inc.
- Creswell, John, (1994), *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publications
- Covid-19 Pandemic Worldwide. (2020), diakses pada laman web <https://reliefweb.int/map/world/covid-19-pandemic-worldwide-dg-echo-daily-map-08082020>
- Detikcom, t. (2020, Mei 15). *Jokowi: Kita Harus Hidup Berdampingan dengan Corona, tapi Tidak Menyerah*. Diambil kembali dari news.detik: <https://news.detik.com/berita/d-5016793/jokowi-kita-harus-hidup-berdampingan-dengan-corona-tapi-tidak-menyerah>
- Dzulfaroh, A. N. (2020, maret 12). *Virus Corona jadi Pandemi Global*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/064800265/virus-corona-jadi-pandemi-global-apa-dampak-dan-langkah-selanjutnya-?page=all>
- Farabi, N. (2019). Sekuritisasi Migrasi

- Australia pada Masa Kepemimpinan Perdana Menteri Malcolm Turnbull. *Hubungan Internasional*, 11.
- Hendra, E. (2018). Sekuritisasi dalam Kerangka "R2P" dan Intervensi Kemanusiaan: Dilema antara Legalitas dan Legitimasi. *Hubungan Internasional*, 23.
- Hastuti, N. (2020). Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19. *Jurnal Kesehatan Masyarakat No 7*, 70-76.
- Iswara, A. J. (2020, Maret 21). *Dari Pusat Wabah Virus Corona, Perlahan China Beri Bantuan ke Negara Lain*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/21/070000470/dari-pusat-wabah-virus-corona-perlahan-china-beri-bantuan-ke-negara-lain?page=all>
- KPCPEN. (t.thn.). *Tanya Jawab*. Diambil kembali dari covid19.go.id: <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20di-maksud%20dengan%20pandemi>
- Lubis, R. R. (2018). Sekuritisasi Isu Keamanan Maritim dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia di ADMM PLUS on Maritime Security. *Jurnal Pertahanan & Bela Diri Negara*, 10.
- McDonald, M. (2008). Konstruktivisme. Dalam P. D. Williams, *Security Studies* (hal. 69). New York: Taylor & Francis e-Library.
- Muhaimin, R. (2018). Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara. *Journal Politica*, 14.
- Pratiwi, Y. I. (2022). Upaya Sekuritisasi Pemerintah Bangladesh terhadap Keberadaan Pengungsi Rohingya. *Journal of International Studies*, 12.
- reliefweb. (2020, April 8). *Covid-19 Pandemic worldwide*. Diambil kembali dari reliefweb: <https://reliefweb.int/map/world/covid-19-pandemic-worldwide-dg-echo-daily-map-08082020>
- Saubani, A. (2020, maret 16). *Cerita Lockdown China yang Diikuti Negara Lainnya*. Retrieved from republika.co: <https://republika.co.id/berita/q79omy409/cerita-lockdown-china-yang-diikuti-negara-lainnya>.
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5.
- Susiatiningsih, H. (2016). Respon Pemerintah Indonesia terkait Sekuritisasi WWF melalui Kampanye Save our Sharks. *Hubungan Internasional*, 15.
- Sari, V. Y. (2020). Analisis Respons Pemerintah Tiongkok dalam Upaya Penanganan Covid-19. *Vol. 1 No. 2 (2020): COVID-19 in International Relations Perspective: Impact on Global Dynamics*, 173-185.
- Widyastuti, R. A. (2020, Maret 25). *Perekonomian Terimbas Corona*. Diambil kembali dari bisnis.tempo: <https://bisnis.tempo.co/read/1323822/perekonomian-terimbas-corona-imf-siap-gelontorkan-rp-16-410-t/full&view=ok>
- Worldtradeorganization. (2020, maret 26). *COVID-19 and world trade*. Diambil kembali dari youtube: https://www.youtube.com/watch?v=v_-ZY1QAr2g
- Walsh, M. (2020, Maret 26). *Bantuan China Kepada Dunia, Termasuk ke Indonesia, Untuk Atasi Virus Corona Hanya Pencitraan?* Diambil kembali dari abc.net: <https://www.abc.net.au/indonesia/2020-03-26/di-balik-bantuan-china-menangani-virus-corona/12093966>
- Yani, Y. M. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.